

Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Pada saat Bencana Alam

ABSTRAK/ABSTRACT

Vivian Wijaya (183309010059)
Marthin Erixon Sitorus (183309010044)

ABSTRACT

Corruption is a crime that harms state finances and the people's economy. Extraordinary enforcement and extraordinary measures are needed. The research purpose is to analyze regulation of corruption crimes committed during natural disasters, analyze the weaknesses of regulation corruption in social assistance funds, and analyze the prevention of corruption during natural disasters. The research type used statute approach. The technique collection data used library research on secondary legal materials. The analysis data used prescriptive analysis. The research theory used crime prevention theory, which is an effort or policy to prevent and combat crime, including the field of criminal policy. The regulation of Corruption Crimes during natural disasters is regulated in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and PERPU Number 24 of 1960 concerning Investigation, Prosecution and Examination of Corruption Crimes. The provision for capital punishment is regulated in Article 2 paragraph 2 of Law Number 31 of 1999, namely in the event that criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty may be imposed. Overcoming corruption during natural disasters can be done with penal and non-penal efforts.

Keywords: *Crime, Corruption, Natural Disasters, Countermeasures*

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara dan perekonomian rakyat. Sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extraordinary enforcement*) dan tindakan luar biasa (*extraordinary measures*). Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis pengaturan tindak pidana korupsi yang dilakukan pada saat bencana alam, menganalisis kelemahan pengaturan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial, dan menganalisis penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan bahan hukum sekunder. Analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori penanggulangan kejahatan yaitu suatu upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Pengaturan Tindak Pidana Korupsi saat bencana alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan PERPU Nomor 24 Tahun 1960 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pidana mati diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Penanggulangan tindak pidana korupsi saat bencana alam dapat dilakukan dengan upaya penal dan non penal.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Bencana Alam, Penanggulangan